



Konstruksi Media Pada Pemberitaan Pemblokiran Media Islam

Aghniya Ilma Hasan^{1*}, Asep Saeful Muhtadi¹, Fakhruroji¹

¹Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : aghniyailmabasan@gmail.com

ABSTRAK

Pada Maret 2015, *Republika* sebagai salah satu media Islam, meliput Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memblokir 22 situs Islam karena dianggap menyebarkan paham-paham radikal dan membahayakan keutuhan NKRI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana HU *Republika* menyusun, merumuskan, menulis, dan menekankan fakta pada pemberitaan tentang pemblokiran media Islam. Melalui metode kualitatif, dengan pendekatan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki, ditemukan hasil bahwa *Republika* menentang keputusan BNPT dan Kemenkominfo yang memblokir situs-situs ini secara sepihak. Dari data yang dianalisis pula, diperoleh indikasi bahwa *Republika* memaknai keputusan BNPT yang menyatakan 22 situs Islam ini sebagai situs berkonten radikal adalah keputusan yang salah. *Republika* yang sebagian besar pembacanya adalah kalangan umat Islam turut tergugah sensitivitasnya ketika meliput isu yang berhubungan dengan umat Islam.

Kata Kunci: media; media Islam; pemblokiran; radikalisme

ABSTRACT

In March 2015, Republika as one of the Islamic media, covered the National Counterterrorism Agency (BNPT) which blocked 22 Islamic sites because they were deemed to be spreading radical ideas and endangering the integrity of the Republic of Indonesia. The aim of this research is to find out how HU Republika compiles, formulates, writes and emphasizes facts in reporting about the blocking of Islamic media. Through qualitative methods, using the Zhongdang Pan and Gerald M Kosicki framing model approach, the results were found that Republika opposed the decision of the BNPT and the Ministry of Communication and Information to unilaterally block these sites. From the data analyzed, indications were obtained that Republika interpreted the BNPT's decision to declare these 22 Islamic sites as sites with radical content as a wrong decision. Republika, whose readers are mostly Muslims, was also triggered its sensitivity when covering issues related to Muslims.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu surat kabar yang menyajikan isu nasional di Indonesia, HU Republika mengusung isu pemblokiran media Islam oleh BNPT, akhir Maret 2015 lalu. Kala itu, umat Islam Indonesia dihebohkan oleh peristiwa pemblokiran sejumlah media *online* Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pada Jumat, 27 Maret 2015, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajukan permohonan pemblokiran sejumlah situs melalui surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs radikal ke dalam sistem blokir Kominfo. Berdasarkan laporan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif, maka kementerian pun memblokir 22 situs yang diajukan. Merujuk pasal 1 Permen tersebut, pemblokiran situs adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.

Setidaknya ada 22 situs Islam yang diblokir, seperti *arrabmah.com*, *voaislam.com*, *ghur4ba.blogspot.com*, *panjimas.com*, *thoriquana.com*, *dakwatuna.com*, *kafulahmujahid.com*, *annajah.net*, *muslimdaily.net*, *hidayatullah.com*, *salamonline.com*, *aqlislamiccenter.com*, *kiblat.net*, *dakwahmedia.com*, *muqawamah.com*, *lasdipo.com*, *gemaislam.com*, *eramuslim.com*, *daulahislam.com*, *shoutussalam.com*, dan *azqammedia.com*. Kabar ini pun sontak membuat para netizen media sosial twitter bereaksi keras untuk memprotes mengenai pemblokiran media Islam oleh Kemkominfo tersebut. Langkah protes tersebut ditunjukkan dengan tanda pagar (tagar) #KembalikanMediaIslam.

Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang lahir di tahun 1999 terkait jaminan kebebasan pers. Faktanya, setelah UU ini lahir, kuantitas industri media setelahnya bertambah begitu cepat. Dalam data Dewan Pers, di tahun 2005 saja sudah tercatat 580 penerbitan, 104 surat kabar, 89 tabloid, dan 387 majalah. Belum lagi media elektronik yang tumbuh begitu subur (Dahlan, 2008: 13). Keputusan untuk memblokir situs Islam tersebut dianggap aneh oleh para netizen, jika dihadapkan dengan undang-undang tersebut.

Alasan peneliti menganggap fenomena ini penting adalah karena konstruksi yang dilakukan HU Republika mempengaruhi persepsi khalayak dalam memandang kasus pemblokiran media Islam oleh BNPT ini. Menurut Robert W Hefner (2000: 70), sejak awal pendiriannya, Republika diidentifikasi sebagai media yang melayani kepentingan umat Islam. Sebagai sebuah media

dengan *counter* pembaca muslim, peneliti ingin tahu apakah HU Republika juga memiliki pandangan tertentu dalam mengkaji masalah keislaman, dan berdakwah melalui jurnalistik.

Namun di sisi lain, Republika adalah media nasional yang tidak hanya memiliki jangkauan luas tetapi juga memiliki beragam kepentingan ekonomi, politik dan ideologi yang berbeda. Sebab meskipun memiliki segmentasi umat Islam, Republika merupakan media independen yang diakui secara nasional. Republika menampung aspirasi di dalam konteks wacana nasional yang menumbuhkan pluralisme informasi kepada masyarakat (Nasrullah, 2003). Oleh karena itu menarik untuk diketahui bagaimana pemberitaan tentang pemblokiran media Islam ditampilkan pada media tersebut.

Pada penelitian lainnya terkait radikalisme dengan judul "*Analisis Framing Pemberitaan Isu Radikalisme pada Media Online*", didapati bahwa Republika cukup moderat dan berimbang dalam memberitakan isu-isu nasional yang berkaitan dengan umat Islam. Republika cenderung melindungi umat Islam, namun di sisi lain tetap menengahi pernyataan pemerintah dengan memaparkan definisi radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Erlangga, 2019: 91).

Melalui *framing* yang dibangun, Republika menganggap Pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam sebagai kelompok radikal. Memang pemerintah mengakui ada kelompok radikal, akan tetapi bukanlah berasal dari umat Islam. Keberimbangan inilah yang diusung Republika, dengan tanpa meninggalkan idealismenya mengakomodir suara umat. Hal ini pula yang berusaha disoroti peneliti saat Republika memberitakan pemblokiran 22 media Islam, sebab media Islam ini merupakan representasi dari umat Islam itu sendiri. Jika melihat profil 22 situs Islam tersebut, dilansir langsung dari *website*-nya, media-media tersebut memang mengusung ideologi Islam-nya sebagai basis yang membangun pemberitaan mereka.

Beberapa media, seperti *arrahmah.com*, adalah sebuah jaringan media Islam yang bertujuan memberikan informasi berimbang tentang Islam dan dunia Islam di tengah-tengah arus informasi modern dan globalisasi. Mereka menjadikan media jurnalisme sebagai wadah perjuangan intelektual dan spiritual untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik. Pun dengan *hidayatullah.com*, portal berita nasional dan internasional yang mengusung motto "mengabarkan kebenaran". Media ini merupakan turunan langsung dari Majalah Hidayatullah, di bawah naungan Kelompok Hidayatullah Media.

Lain lagi dengan *voa-islam.com*, yang latar belakang pendiriannya didasarkan pada keprihatinan atas realita umat islam di Asia Tenggara yang makin termarginalkan oleh kapitalis, dan gerakan zionis melalui labelisasi sebagai

Aghniya Ilma Hasan, Asep Saeful Muhtadi, Fakhruroji
ekstrimis, konservatif dan fundamentalis terhadap perjuangan dan dakwah Islam yang haq, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, yaitu *salafus sholeh*.

Pada kenyataannya, di antara 22 media Islam itu, ada sebagiannya yang masih belum terdaftar sebagai pers di Dewan Pers. Namun, bagi media-media yang telah resmi terdaftar di dalamnya, pemblokiran ini terasa ganjil dan tidak adil. Untuk meneliti kasus ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena sesuai dengan analisis *framing* yang mencari sudut pandang wartawan dalam menafsirkan sebuah realitas. Peneliti menggunakan konsep *framing* Zhongdan Pan dan Kosicki. Peneliti ingin meneliti bagaimana cara wartawan mengonstruksi realitas untuk kemudian disajikan sebagai berita kepada khalayak. Analisis framing merupakan salah satu model analisis yang bisa mengungkapkan rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. (Eriyanto, 2002: 67)

Analisis framing mempunyai asumsi bahwa wacana media massa mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kepentingan publik dari bermacam-macam isu dan persoalan yang hadir dalam wacana publik. Dalam memberitakan sebuah peristiwa, wartawan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek sosiologis atau konstruksi sosial terhadap realitas. Model framing Zhongdan Pan dan Kosicki berlandaskan kajian tentang penempatan informasi dalam suatu konteks serta penempatan elemen tertentu dari suatu isu.

Pada dasarnya teori mengenai *framing* berfokus pada hal-hal mikro, yaitu peristiwa, individu, dan isi teks berita. Meskipun demikian, teori ini dapat dikombinasikan dengan hal-hal makro untuk membuat kerangka konseptual dengan mempertimbangkan: (i) konteks sosial dan politik tempat *framing* itu terjadi dan (ii) pengaruh jangka panjang oleh framing yang digunakan media terhadap kondisi sosial politik yang ada. Sebuah isu yang memiliki daya tarik besar sudah pasti akan menarik minat dari media massa untuk memberitakannya. Semakin besar tingkatan isu, maka daya tarik media untuk memberitakannya semakin tinggi. Bagi media keberadaan *news value* pada suatu kasus ibarat emas pada sebuah tambang yang selalu dicari dan diperebutkan.

Media tertentu memberitakan dengan cara menyeleksi isu tertentu, menonjolkan aspek dari isu tersebut, sedangkan media lain mengabaikan dan bahkan menghilangkan aspek lainnya. Ini membuktikan bahwa di balik independensi dan objektivitas, media menyimpan bias dan keberpihakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemahaman tersebut disandarkan pada redaktur atau wartawan, ketika mereka memandang sebuah realitas sosial, yaitu pemblokiran media Islam oleh BNPT. Dengan begitu, peneliti menemukan pembentukan atau penciptaan makna dari apa yang ditangkap oleh pihak redaksi HU Republika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana HU Republika menyusun, merumuskan, menuliskan, dan menekankan fakta pada pemberitaan tentang pemblokiran media Islam. Diharapkan penelitian ini berguna secara praktis untuk mengetahui penyeleksian isu yang dilakukan oleh media massa atas sebuah realita.

LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki untuk mendeskripsikan bingkai pemberitaan kasus pemblokiran 22 situs Islam oleh BNPT, pada Harian Republika pada edisi 30 Maret - 30 April 2015. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* tersebut merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata, dan kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan.

Dengan model *framing* ini, berita-berita terkait kasus ini dianalisis dengan dikelompokkan dan diuraikan ke dalam empat struktur besar: (1) struktur sintaksis, (2) struktur skrip, (3) struktur tematik, dan (4) struktur retorik. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dan bagian berita (headline, lead, latar informasi, sumber, penutup) dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk yang tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun.

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan merumuskan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil.

Struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retorik melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk memberi penekanan pada arti tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Republika memiliki ideologi Islami yang tercermin dalam visi dan misi yang mewadahi aspirasi umat Islam, sehingga memiliki kedekatan psiko-ideologis

Aghniya Ilma Hasan, Asep Saeful Muhtadi, Fakhruroji dengan pembacanya. Hasil penelitian berdasarkan analisis *framing* Pan dan Kosicki, ditemukan bahwa Republika sebagai koran nasionalis yang menetapkan segmentasi pembacanya dari muslim, menentang keputusan Kemenkominfo dan BNPT memblokir situs-situs Islam melalui sembilan berita yang mereka sampaikan. Kesimpulan ini didapat karena mencermati penonjolan, dan pertautan fakta yang digunakan Republika dalam menggiring interpretasi khalayak melalui aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Tabel 1 Pendekatan Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang diamati
SINTAKSIS : Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	Headline, Lead, Latar Informasi, Kutipan, Sumber, Pernyataan, Penutup.
SKRIP: Cara wartawan merumuskan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK: Cara wartawan menulis fakta	3. Detail o Maksud kalimat berhubungan o Nominalisasi antar kalimat o Koherensi o Bentuk kalimat o Kata Ganti	Paragraf, Proposisi
RETORIS: Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon, Grafis, Metafora, Pengandaian	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik

(Sobur, 2004: 161)

Sintaksis

Menurut Pan dan Kosicki dalam Eriyanto (2002: 257), terdapat beberapa unit pengamatan yang dapat dikaji untuk menganalisis struktur sintaksis. Unit tersebut adalah *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, dan penutup. Peneliti menganalisis struktur sintaksis berita Republika.

Berita pemblokiran 22 situs media Islam langsung dimuat sebagai *headline*

halaman pertama sehari setelah pemblokiran. Judul "22 Situs Islam Diblokir" digunakan Republika untuk menerangkan dengan jelas dan lugas jumlah situs Islam yang terkena blokir Kemenkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Di bawah judul, Republika meletakkan sebuah kalimat yang menjadi *bridge* sebelum masuk ke teras berita atau lead. Bridge ini berfungsi mengantarkan pembaca sebelum masuk ke paragraf pembuka dan isi berita. Bridge ini menjelaskan secara singkat mengenai masyarakat yang mendesak pemerintah memerinci alasan pemblokiran, terutama karena kala itu, BNPT sebagai pihak pelapor belum dapat dikonfirmasi atas kasus pemblokiran ini. Berikut kutipan bridge berita ini:

Pemerintah didesak memerinci alasan pemblokiran sejumlah situs Islam. (Republika, 30 Maret 2015)

Sementara itu dalam *lead*, Republika menjelaskan mengenai Kemenkominfo yang saat itu masih memproses laporan yang disampaikan BNPT. Informasi yang disampaikan Humas Kemenkominfo, Ismail Cawidu tersebut ditegaskan dengan pernyataan bahwa BNPT melapor pada pihaknya atas dugaan penyebaran radikalisme. Teras berita yang digunakan adalah *lead who* untuk menegaskan pelaku yang terlibat dalam kasus pemblokiran ini. Berikut adalah kutipan *lead* serta pernyataan yang diungkapkan Ismail Cawidu:

JAKARTA-Pihak Kementrian dan Komunikasi Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tengah memproses pemblokiran sejumlah situs media Islam sejak Ahad (29/3). Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu, situs-situs tersebut dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena menyebarkan paham radikal.

"Pertama tiga, lalu 19. Jadi 22 (websites) dikategorikan sebagai website penggerak radikalisme," ujar Ismail Cawidu saat dihubungi Republika, Senin (30/3). Ismail melanjutkan, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan dari BNPT melalui surat bernomor No. 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal.

Berita "22 Situs Islam Diblokir" terbagi menjadi empat bagian bahasan tanpa menggunakan sub judul. Dalam bagian pertama, Republika berusaha mengonfirmasi Kemenkominfo terkait pemblokiran. Dalam bagian pertama dijelaskan bahwa Kemenkominfo merupakan pihak yang hanya mengeksekusi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan BNPT. Melalui Kemenkominfo, BNPT menilai situs-situs Islam tersebut menyebarkan paham-paham radikalisme yang bisa berbahaya pada masyarakat.

Bagian kedua Republika menjelaskan mengenai *track record* sebagian dari

situs-situs Islam tersebut, terutama situs-situs yang telah lama dikenal dan familiar di telinga masyarakat Indonesia. Situs-situs yang disebutkan Republika adalah *bidayatullah.com*, *arrabmah.com*, *dakwatuna.com*, *eramuslim.com*, dan *muslimdaily.net*. Dari hasil pantauan Republika, situs-situs tersebut banyak memuat pemberitaan mengenai keislaman, dakwah, dan kabar terkini dari negeri Islam. Bahkan, situs-situs ini menentang ISIS yang menggempur Timur Tengah. Situs-situs Islam ini juga kerap memuat berita kritik atas kebijakan pemerintah, maupun Amerika Serikat dan Israel yang dianggap merugikan umat Islam. Ini menggambarkan bagaimana Republika memandang situs-situs Islam ini, yang nyatanya kontras dengan tuduhan BNPT mengenai radikalisme.

Di bagian ketiga, Republika tak berhasil mengonfirmasi kasus ini langsung ke pihak pelapor, yaitu BNPT. Kendati demikian, Republika sempat mencuplik pernyataan Deputy Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti, dua hari sebelum terjadinya kasus, yaitu 27 Maret 2015. Republika mengambil frame saat Agus menyatakan pihaknya tengah menangani penyebaran radikalisme melalui dunia maya yang terlambat ditangani. Sebelumnya, seorang konsultan Amerika Serikat pun turut menyuarakan usulan pencegahan terorisme melalui internet pada acara seminar mantan kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono. Republika berupaya menggambarkan bahwa pemblokiran ini telah sengaja direncanakan BNPT, melalui pandangan-pandangan para tokoh ini.

Sementara di bagian akhir, Republika mencuplik dua tokoh yang menyatakan pernyataan kontra atas kasus ini. Dua tokoh ini adalah Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa B Nahrawardaya, dan anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin. Keduanya sepakat menyayangkan pemblokiran yang dilakukan secara tiba-tiba, yang lebih jauh akan mencederai keseimbangan informasi dan membunuh kebebasan pers. Atas cederanya kebebasan pers ini, Republika pun menyorot keganasan netizen yang ramai dengan tagar #KembalikanMedialIslam, juga tindakan Dewan Pers yang akan turut menindaklanjuti kasus pemblokiran ini. Jika melihat bagian pertama sampai ketiga yang hanya bersifat konfirmasi atas kasus, bagian keempat ini menjadi bagian penting dimana Republika menyatakan ketidaksepakatannya melalui pernyataan dua tokoh ini yang sengaja diletakkan terakhir sebagai intisari dari berita. Sebab, dari semua narasumber, Republika tidak mencantumkan narasumber yang bernada sepakat atas pemblokiran, maupun atas tuduhan radikal pada situs-situs Islam.

Berita yang ditampilkan Republika sesuai dengan yang disampaikan Pan dan Kosicki (1993). Bahwa struktur Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan, kutipan pengamatan atas peristiwa) kedalam bentuk susunan umum berita. Dari hasil penelitian

tersebut, didapati pula bahwa dalam memutuskan fakta mana yang pantas dijadikan berita, wartawan *Republika* berkaca pada acuan bernama nilai berita (*news value*). Nilai berita itu tidak lebih dari asumsi-asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang mendapat perhatian mereka. Secara umum, menurut Kusumaningrat (2005: 60-66), nilai berita mengandung unsur-unsur seperti keluarbiasaan, kebaruan, akibat, aktual, kedekatan, informasi, konflik, orang penting, kejutan, ketertarikan manusiawi, dan seks. Semakin banyak mengandung unsur-unsur tersebut, maka nilai berita sebuah peristiwa pun menjadi semakin besar.

Republika mengangkat berita tentang pemblokiran situs media massa Islam sebagai *headline* karena peristiwa ini memiliki nilai berita yang besar. Pertimbangan pengangkatan sebuah berita menjadi *headline* di *Republika* ini pertama, karena memang berita atau peristiwa tersebut memiliki ciri yang kuat, serta melibatkan banyak orang. Sesuai standar jurnalistik, yakni memiliki nilai kemanusiaan serta menyangkut hajat orang banyak. Serta keunikannya, bagaimana sebuah hukum diterapkan. (Samsuri, 2013)

Setelah menakar nilai berita dalam sebuah peristiwa, proses produksi berita dapat segera dilakukan. Dalam proses produksi berita ini penggunaan judul merupakan salah satu unsur yang diperhatikan. Semakin tingginya mobilitas serta aktivitas khalayak, membuat pembaca media cetak menderita *headline syndrome*. Mereka ini merupakan jenis pembaca yang lebih suka menelusuri judul-judul berita ketimbang membaca berita secara keseluruhan. Akibatnya jelas, pembaca menafsirkan berita hanya dengan membaca judul beritanya saja (Sobur, 2002: 168). Konsekuensinya, permasalahan dapat timbul apabila judul berita yang dituliskan disajikan dengan sensasi berlebihan dan tidak menggambarkan isi berita. Alhasil, dapat terjadi kesalahan pembentukan penafsiran dari khalayak pembaca terhadap realitas yang diberitakan media.

Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dan bagian berita (*headline, lead, latar informasi, sumber, penutup*) dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk yang tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun (Eriyanto, 2004).

Hal ini senada dengan Nugroho (1999: 31), pada sintaksis biasanya terdapat skema berita, dan unit yang diamati, seperti *headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan penutup*. Struktur sintaksis dapat memberikan petunjuk yang berguna untuk wartawan dalam memaknai peristiwa dan hendak kemana berita itu akan diarahkan. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik, yang dimulai dengan *headline, lead, episode latar, dan penutup*. Dalam bentuk piramida terbalik ini, bagian yang di atas ditampilkan lebih penting dibandingkan dengan bagian bawahnya. Elemen sintaksis memberi

petunjuk yang berguan tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita itu akan dibawa.

Seperti pada struktur wacana umum lainnya, struktur sintaksis menandakan arti penting, relevansi, dan kemenonjolan. Dengan kata lain, struktur ini memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa dijadikan sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian ini dilakukan dengan menempatkan bagian penting di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.

Skrip

Struktur Skrip berkaitan dengan bagaimana seorang jurnalis menuturkan atau mengisahkan kejadian dalam bentuk berita. Bentuk umum dari struktur Skrip ini adalah pola 5W + 1H (Kosicki, 1993). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan demi keakuratan fakta yang dipaparkan.

Menurut Chaer (2010:17-18), unsur 5W+1H tersebut mencakup antara lain: 1) *what* (apa yang terjadi), 2) *who* (siapa yang terlibat dalam kejadian), 3) *why* (mengapa kejadian itu terjadi), 4) *where* (dimana kejadian itu terjadi), 5) *when* (kapan terjadinya), 6) *how* (bagaimana kejadiannya). Dan semua unsur ini dalam setiap bagian berita, memiliki peran dan kontribusi dalam membangun sebuah berita. Kelengkapan 5W+1H adalah suatu teknis penulisan yang sangat penting dalam mendukung berita yang baik dan dapat menyajikan informasi yang jelas, aktual dan menarik yang disampaikan melalui media massa secara tulis maupun lisan. (Sumadiri, 2017).

Dalam berita “22 Situs Islam Diblokir” pada 31 Maret 2015, terlihat bagaimana Republika menceritakan isu ini. Framing Republika dapat dikaji melalui aspek pengisahan fakta atau skrip, yakni melalui unsur *who*, *what*, *when*, *where*, *why*, dan *how*. Pada berita ini, yang paling ditekankan *who*, *why*, dan *how*.

Aspek *who* sangat ditekankan, yang menunjukkan pihak Kemenkominfo bertanggungjawab atas diblokirnya 22 situs Islam. Bahkan bagian ini menjadi *lead*, yang membuktikan bahwa Republika mencoba menekankan Kemenkominfo sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pemblokiran media Islam. Dalam jurnalistik, berita dapat diawali oleh unsur sesuai dengan kehendak penulis berita. Kusumaningrat (2012: 129) menjelaskan, “Kata-kata pembuka berita dapat memilih “*W*” mana saja yang disukai, misalnya dengan mengajukan pertanyaan berikut: *What* (apa yang terjadi?), *Where* (di mana terjadinya?), *When* (kapan terjadinya?), *Who* (siapa yang terlibat?), *Why* (mengapa bisa terjadi?), *How* (bagaimana bisa terjadi?).”

Aspek *who* ini dipertegas dengan aspek *why*, yang menunjukkan alasan Kemenkominfo melaporkan situs-situs Islam ini pada BNPT adalah karena mengantisipasi adanya gerakan radikalisme, meski tak ada bukti kuat karena situs-situs Islam tersebut merupakan situs pemberitaan biasa yang banyak memuat tulisan keislaman.

Sementara aspek *how*, Republika memaparkan bagaimana proses pemblokiran tersebut diberlakukan sesuai laporan BNPT oleh Kemenkominfo di paragraf kedua. Republika melampirkan tabel proses pemblokiran untuk memberikan kesempatan pada pembaca untuk menilai, apakah Kemenkominfo BNPT telah memblokir Islam tersebut sesuai dengan prosedur UU atau tidak. Lalu, aspek *how* juga menjelaskan bagaimana implikasi dari pemblokiran ini. Republika menjelaskan bagaimana tagar #KembalikanMediaIslam ramai di media sosial, sebagai bukti marahnya para netizen atas pemblokiran situs Islam ini secara sepihak. Selain itu, Republika juga mewawancarai dua orang narasumber (narasumber pertama berasal dari pusat informasi Muhammadiyah dan narasumber kedua adalah anggota komisi I DPR) yang sama-sama menyayangkan tindakan BNPT yang terburu-buru.

Berikut kutipan beritanya:

Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa B Nahrawardaya menilai, pemblokiran situs-situs Islam yang dinilai BNPT menyebarkan radikalisme, mencederai prinsip keseimbangan informasi.

Dalam teks berita lainnya dengan judul “Pemblokiran Dievaluasi”, Republika kembali menekankan aspek *who* dan *why*. Tokoh-tokoh berpengaruh, seperti Jusuf Kalla dan Lukman Hakim membingkai berita ini. Republika juga mengutip pihak-pihak yang dirugikan dalam kasus ini, yaitu pemred Hidayatullah, AQL Islamic Centre, dan Gema Islam. Terakhir, Republika menjadikan Kemenkominfo dan BNPT sebagai narasumber penutup. Ini membuat berita terlihat komprehensif, dengan mengakomodir berbagai sudut pandang.

Hampir di setiap paragraf yang ditulis, Republika juga menekankan aspek *why*. Republika mengutip ucapan narasumber yang bernada setuju untuk melakukan evaluasi atas pemblokiran situs Islam. Permintaan evaluasi ini dilakukan sebab banyak yang merasa sebagian situs Islam tersebut tidak berbahaya atau menebarkan paham berbahaya. Adanya sudut pandang dari pemilik situs pun untuk menguatkan pandangan bahwa alasan dan kriteria yang disampaikan BNPT sangat lemah. Aspek *why* ini terjawab dari jawaban BNPT yang memaparkan kriteria radikal yang dipakai BNPT, meski masih belum dapat dipastikan apakah situs-situs tersebut sesuai dengan kriteria tersebut atau tidak.

Unsur kelengkapan berita Republika menjadi penanda framing yang

penting. Sebab di dalam unsur-unsur teks harus mengandung unsur berita yang lengkap, dan pokok-pokok informasi dari berita tersebut terangkum dalam 6 pertanyaan 5W+1H. Rumusan 5W+1H adalah unsur dasar yang seharusnya dipenuhi jurnalis dalam sebuah berita. Menurut Tinambunan, unsur ini menjadi pedoman untuk menguji kelayakan sebuah berita (2017: 116).

Skrip dengan 5W+1H yang lengkap adalah salah satu strategi wartawan Republika dalam mengonstruksi berita “22 Situs Islam Diblokir”: bagaimana peristiwa pemblokiran dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Eriyanto, 2004). Bagi jurnalis, pemahaman mengenai 5W+1H sangat penting agar dapat menentukan prioritas, mana di antara bagian-bagian itu yang akan ditonjolkan. Dan agar pembaca memperoleh informasi berita secara mendalam dan menyeluruh, maka kesatuan unsur 5W+1H harus benar-benar diperhatikan.

Dalam hal ini, meskipun lengkap menyajikan 5W+1H, Republika secara konsisten menekankan BNPT dan Kemenkominfo sebagai dalang pemblokiran (aspek *who*) dan alasan mengapa pemblokiran tersebut dinilai sangat bias oleh berbagai pihak (aspek *why*). Unsur *who* (siapa) adalah satu unsur pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut. Sementara unsur *why* (kenapa) umumnya menekankan alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas, dalam hal ini alasan pemblokiran media Islam. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada. (Masri, 2010)

Tematik

Pada unsur Tematik, Republika cenderung menekankan pada detail, koherensi, dan bentuk kalimat. Dibuktikan dengan adanya berita “Kebijakan Pemerintah Terbalik”. Republika menggali pandangan berbagai tokoh yang menganggap alasan Kemenkominfo dan BNPT tidak relevan, juga tidak ada definisi jelas mengenai radikal dalam memblokir situs-situs Islam. Hanya satu narasumber yang menjadi penyeimbang, yaitu dari BNPT sendiri yang berdalih tengah menggempur ideologi tertentu yang berbahaya bagi NKRI.

Tema pertama yang dihadirkan dalam berita ini adalah kritik sekaligus saran bahwa seharusnya tim panel bersikap edukatif dan persuasif dalam menangani terorisme. Sehingga, sebelum terjadinya pemblokiran, situs-situs Islam tersebut bisa diperingatkan terlebih dahulu. Namun yang terjadi adalah

pemerintah justru membentuk tim panel karena keberatan dan protes masyarakat terhadap keputusan tak berimbang pemerintah. Cara penulisan berita ini menunjukkan kecenderungan *Republika* dalam menyatakan pemerintah membuat kebijakan yang tidak efektif, karena hanya menyelesaikan masalah saat masalah itu terjadi.

Kedua, tema yang diangkat adalah penuturan ulang mengenai kebijakan kemenkominfo dalam membentuk tim panel. Rudiantara membuat tim panel ini untuk menilai dan mengkaji ulang protes masyarakat terkait pemblokiran. Ia berpendapat, adanya pemblokiran ini bertujuan untuk menangkal radikalisme. Bukan semata karena anggapan masyarakat yang berpendapat pemerintah anti-Islam. Pernyataan Rudiantara ini ditulis *Republika* sebagai bentuk dalih Kemenkominfo dalam menanggapi protes masyarakat. Selain Rudiantara, *Republika* pun mengutip pernyataan Din Syamsudin dan Gus Sholah yang menjadi anggota tim panel. Jika menilik pernyataan keduanya, *Republika* membingkai kutipan keduanya, bahwa dua tokoh ini tetap akan meninjau ulang pemblokiran, dan akan menolak upaya pemblokiran yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ini menyiratkan, kendati membantu pemerintah, kedua tokoh ini tetap mengakomodir kepentingan umat dan tetap mempertimbangkan aspek-aspek radikal yang dimaksud BNPT.

Ini sesuai dengan yang disampaikan Pan dan Kosicki (1993), berita mirip sebuah pengujian hipotesis: peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan, itu digunakan untuk membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang dibuat.

Tema yang dihadirkan atau dinyatakan secara tidak langsung atau kutipan sumber dihadirkan untuk mendukung hipotesis. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menyebut struktur tematik dari berita. Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Kalau struktur sintaksis berhubungan dengan pernyataan bagaimana fakta yang diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada skema atau bagan berita, maka struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. (Eriyanto, 2004)

Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil. Dalam menulis berita, seorang wartawan mempunyai tema tertentu atas suatu peristiwa. Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini. Diantaranya adalah koherensi, yakni pertalian atau jalinan antarkata, proposisi, atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat

dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. Apabila suatu ujaran atau wacana tidak memiliki koherensi, maka hubungan semantik-pragmatik yang seharusnya ada menjadi tidak terbina dan tidak logis.

Hal ini terlihat pada bagaimana Republika mengangkat pendapat Hanafi Rais terkait kebijakan pemerintah yang terbalik di paragraf 1-5. Hanafi mengungkapkan keheranannya karena pemerintah memberlakukan kebijakan secara terbalik. Setelah timbulnya keberatan dan keresahan masyarakat atas kasus pemblokiran 22 situs Islam ini, pemerintah baru menanggapi dengan pembentukan tim panel. Padahal, jika merujuk pada latar, Hanafi berpendapat seharusnya pemerintah seharusnya membentuk tim preventif dengan fungsi persuasif dan edukatif-nya, sehingga bisa menegur dan memperingatkan pemilik situs terkait konten.

Di paragraf berikutnya, Republika langsung menyambung dengan fakta bahwa Rudiantara membentuk tim panel yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dan nasional, seperti Din Syamsudin dan Gus Sholah. Republika memadukan opini tokoh dan fakta lapangan pembentukan tim panel ini untuk menunjukkan langkah pemerintah yang terkesan tanpa pertimbangan, dan mengatasi masalah setelah masalah terjadi tanpa adanya langkah-langkah preventif. Kridalaksana (dalam Hartono, 2012) mengemukakan bahwa koherensi merupakan hubungan semantis. Sementara menurut Brown (dalam Mulyana, 2005), koherensi berarti kepaduan antar satuan lingual dalam teks atau tuturan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa koherensi merupakan unsur di luar kalimat yang keberadaannya berfungsi untuk menciptakan kepaduan antarbagian dalam teks.

Komunikasi tekstual berbeda dengan komunikasi lisan. Koherensi dalam sebuah teks sebagai sebuah media komunikasi non lisan berperan penting dalam berhasil tidaknya pesan dalam teks tersebut disampaikan pada pembaca. Jika sebuah teks tidak memiliki koherensi, maka pesan yang disampaikan dalam teks tersebut dapat disalahartikan oleh para pembaca. (Halliday, 1976)

Yule (2014) menyatakan bahwa masing-masing individu akan mengaitkan secara lokal sebuah pengalaman yang akan terikat dengan keakraban dan harapan. Dari pengalaman tersebut pembaca dapat memahami tema dalam sebuah teks. Dari bagian-bagian struktur tematik itu, maka terlihat cara pandang wartawan Republika atas suatu peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.

Retoris

Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan, Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retorik dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. (Eriyanto, 2003)

Dilihat dari pengemasan hasil wawancara narasumber pada berita “Pemblokiran Dievaluasi”, *Republika* banyak menggunakan aspek leksikon. Dari segi pemilihan kata *Republika* tampak sedikit memainkannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meninjau ulang pemblokiran 22 situs Islam yang dinilai menyebarkan radikalisme. Kalla menilai, ada di antara situs-situs itu yang tak punya kaitan dengan radikalisme.

Di paragraf pertama, *Republika* sengaja menggunakan kata 'JK memerintah, dan bukan JK meminta' sebagai penekanan bahwa JK memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengubah keputusan Kemenkominfo. Kata 'memerintah' pun menjadi tanda bahwa nyatanya JK pun berpendapat bahwa terdapat kejanggalan dan ketidakcermatan berpikir dalam memutuskan perkara pemblokiran 22 situs Islam ini. *Republika* juga menggunakan kata 'berkeras' di paragraf 13, sebagai kata penjelas bahwa BNPT tengah membela diri meski banyak pihak yang memandang keputusan pemblokiran tersebut salah.

Leksikon adalah pemilihan, dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016:805), leksikon didefinisikan sebagai komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Ini adalah salah satu bagian penting pada unsur Retorik. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Dalam satu kata terdapat pilihan kata yang sinonim dengan kata tersebut, dan seseorang dapat memilih diantara pilihan kata yang tersedia. Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai tidak semata-mata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap realitas.

Pada berita “Hak Sipil Dilanggar”, *Republika* menulis:

Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Ali Munhanif menyatakan, pemblokiran puluhan situs Islam oleh Kementerian (Kemenkominfo) dapat menimbulkan kembali trauma umat Islam Komunikasi dan Informatika Indonesia akan kebijakan pemerintahan Orde Baru.

Republika menggambarkan efek yang diterima masyarakat dengan istilah trauma. Menurut KBBI, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Ini dipakai untuk menggambarkan betapa luka yang dialami umat Islam saat kepemimpinan Soeharto tersebut sangatlah berat. Karena mereka harus mengalami pergerakan dan dakwah Islam mereka dibatasi sedemikian rupa. Sehingga, langkah yang diambil pemerintah yang seakan menjegal dakwah Islamiah ini dikhawatirkan membuka lagi luka lama yang masih membekas di hati umat Islam.

Pada paragraf lainnya, Republika juga menggunakan istilah ‘salah kaprah’ atas rancunya acuan yang ditetapkan BNPT. Republika menampilkan kesan bahwa BNPT tidak tahu menahu dan salah paham atas dakwah Islam yang dilakukan situs-situs Islam ini. Sehingga akibatnya, BNPT terkesan asal melakukan *takfiri* dan menyatakan 22 situs Islam ini telah menyebarkan konten radikal pada masyarakat.

Selain lewat kata, penekanan pesan dalam berita itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan unsur grafis (Nugroho, 1999). Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan dengan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, dan huruf yang dibuat dengan ukuran huruf lebih besar. Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, karena ia menginginkan khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. Pada berita ini, Republika menebalkan kalimat “*Sejumlah media yang diblokir mempertanyakan kriteria radikalisme BNPT*” di bagian *lead* sebagai penekanan pada berita ini.

Pemilihan dan penekanan kata yang dilakukan wartawan menunjukkan bahasa berita yang digunakan oleh media. Dalam pandangan Sapir-Howrf (dalam Widhiarso, 2005), bahasa berita tidak sekadar persoalan deskriptif di mana ia merupakan sarana dalam melukiskan fenomena atau kejadian di satu lingkungan, tetapi ia juga mempengaruhi cara pembaca melihat lingkungan. Sebab itu, bahasa dapat dimanfaatkan untuk memberikan aksentuasi tertentu pada suatu kejadian dengan cara mempertajam diksi, memperlembut, menekankan, mengagungkan, membelokkan, atau mengaburkan sebuah peristiwa.

Wacana media dapat dikonsepsikan sebagai seperangkat kemasam interpretif yang memberi makna pada suatu isu. Suatu kemasam memiliki struktur internal. Intinya adalah suatu gagasan yang mengorganisasikan, atau suatu kerangka (*frame*), untuk memahami peristiwa-peristiwa yang relevan. (Gamson, 1989)

Menurut Gamson dan Modigliani, kerangka ini lazimnya mengisyaratkan suatu rentang pandangan, alih-alih satu pandangan saja, memungkinkan suatu

perdebatan di antara mereka yang berbagi kerangka yang sama. Kerangka atau seperangkat simbol yang padat dalam kemasan berita ini dapat menunjukkan kemasan tersebut sebagai keseluruhan dengan metafor yang tangkas, frase kunci, atau sarana simbolik lainnya. Dalam hal ini, Republika menunjukkan pandangan dan gagasannya dalam teks serta wacana berita yang ditampilkan melalui pemilihan kata dan penekanan secara grafis.

Priyanti (2014: 65) menjelaskan bahwa teks merupakan ujaran lisan atau tertulis bermakna yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan. Mengungkapkan gagasan dalam bentuk teks haruslah harus memilih kata-kata dan strategi yang sesuai dengan konteks. Teks adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan sosial tertentu dalam konteks situasi tertentu. Dalam isu pemblokiran media Islam, Republika mencoba memberikan kesadaran di tengah masyarakat muslim tentang salah kaprah dalam memaknai kata ‘radikalisme’, yang jika dibiarkan bisa berdampak pada umat Islam secara keseluruhan.

Meski diksi yang digunakan Republika tajam penekanannya, seperti: ‘memerintah’, ‘trauma’, atau ‘berkeras’, namun maknanya sangat jelas dan dapat ditangkap langsung oleh pembaca. Bahasa jurnalistik yang dipersembahkan Republika bersifat informatif, tidak ambigu, dan tidak bertele-tele. Sebagaimana menurut Hasnun, bahasa Indonesia yang digunakan dalam membuat berita haruslah mudah dipahami masyarakat umum. (2006:122)

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan frame pemberitaan tentang pemblokiran situs-situs Islam di harian Republika adalah sebagai berikut. Pada struktur Sintaksis, Republika menyusun fakta dengan memilah dan memilih fakta-fakta yang mereka anggap penting. Penyusunan ini dimulai dari saat Republika menentukan *headline*, *lead*, penentuan kutipan, serta pemilihan fakta penutup berita. Dalam setiap berita, Republika umumnya menganggap penting fakta bahwa BNPT dan Kemenkominfo tidak memiliki alasan relevan dalam memblokir 22 situs Islam.

Hal ini dibuktikan dengan cara Republika menyusun rangkaian opini narasumber penyebutan Undang-Undang yang menunjukkan dan dukungan penyebutan kecenderungan Republika menganggap BNPT dan Kemenkominfo telah salah langkah. Di setiap berita, Republika juga kerap menutup berita dengan opini-opini pakar, yang akan menguatkan fakta-fakta yang disusun di

awal. Lalu pada struktur skrip (merumuskan masalah) yang menjabarkan 5W+1H, Republika menggarisbawahi aspek who, why, dan how. Dalam setiap berita, Republika menjadikan BNPT dan Kemenkominfo sebagai subjek utama (who), yang menjadikan keduanya tampak seperti pelaku dalam kasus pemblokiran, sementara para pemilik situs adalah korban.

Di aspek why, Republika fokus menyampaikan alasan-alasan yang menyuarkan keduanya bertanggungjawab atas pemblokiran, terutama karena biasanya alasan pemblokiran terjadi. Selain karena dianggap tidak memiliki landasan yang kuat, pemblokiran yang dilakukan secara tiba-tiba ini juga dinilai para pakar telah melanggar regulasi. Sementara itu, di aspek why, Republika menjelaskan bagaimana kasus tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo, juga bantuan-bantuan dari Dewan Pers dan MUI.

Sementara pada struktur Tematik, cara Republika menuliskan dan mengisahkan fakta (struktur tematik) adalah dengan membagi-bagi badan berita menjadi beberapa tema yang berhubungan. Selain pernyataan fakta BNPT dan Kemenkominfo memblokir 22 situs Islam, Republika menghubungkannya dengan dukungan dan bantuan kepada para pemilik situs yang berasal dari para tokoh-tokoh, seperti Dewan Pers, MUI, lembaga riset, maupun pakar internet

Terakhir, di struktur Retoris, Republika menekankan fakta dengan cara memainkan beberapa kata dan gambar. Selain pemilihan judul yang lugas dan tidak provokatif, Republika menggunakan perangkat framing berupa grafis dalam bentuk tabel Undang-Undang dan foto para pemilik situs terblokir, koherensi, dan leksikon untuk menekankan beberapa aspek tertentu dalam kasus pemblokiran ini.

Republika cenderung tidak menggunakan perumpamaan atau dramatisasi dalam memberitakan kasus pemblokiran ini. Republika tampak tak terlalu membutuhkan perumpamaan dalam menonjolkan dan menekankan fakta bahwa BNPT berkeras menyatakan 22 situs Islam tersebut menyebarkan radikalisme. Kendati demikian, Republika terus mempertegas fakta dengan hadirnya grafis dan penggunaan katanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, S. (2004). *Semiotika komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. England: Penguin Books.
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi sosial media massa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chaer, A. (2010). *Bahasa jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Eriyanto. (2002). *Analisis framing, konstruksi, ideologi, dan politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2009). *Analisis wacana, pengantar analisis teks media* (Cet. ke-7). Yogyakarta: LKiS.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. London: Harvard University Press.
- Hasnun, A. (2006). *Pedoman menulis untuk siswa SMP dan SMA*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kaufman, S. (2011). *Framing matters: Perspectives on negotiation research and practice in communication*. Switzerland: Peter Lang.
- Kusumaningrat, H., & Purnama, K. (2012). *Jurnalistik dan praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, D. (1997). *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, A. F. (2003). *ICMI: Antara status quo dan demokratisasi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Nugroho, B. (1999). *Politik media mengemas berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Nurudin. (2004). *Komunikasi massa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75.
- Priyanti, E. T. (2014). *Desain pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saripudin, A. (2003). *Tomy Winata dalam citra media: Analisis berita pers Indonesia*. Jakarta: Jari.
- Sudibyo, A. (2001). *Politik media dan pertarungan wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Sumadiria, H. (2008). *Jurnalistik Indonesia, menulis berita dan feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tinambunan, J. (2017). *Tips praktis menulis karya ilmiah*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.